

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA BANDUNG)**

**INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS AND GOOD
GOVERNANCE FOR REGIONAL GOVERNMENT PERFORMANCE
(Case Study of Regional device organization in Bandung City)**

Pembimbing :
Dr. Ony Widilestariningtyas, S.E., M.Si., Ak., CA

Oleh :
Mufid Widayat
21115031

**Prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
E-mail : Mufidwidayat@gmail.com**

ABSTRACT

Local Government Performance is the Performance of Local Government Organizations or Agencies. The phenomenon of the performance of local governments in the United Nations payment affects the performance of local governments because it is a benchmark in the preparation of financial statements. The purpose of this study is to find out the description of the regional financial accounting system, good governance, and the performance of local governments and find out its effects.

The method used in this research is descriptive and verification methods. The population used in this study was 45 Local Government Organizations (OPD). Sampling used in this study with a purposive sampling technique that is 20 Local Government Organizations (OPD) in Bandung, with 57 respondents. Testing data used is the validity test and reliability test using SPSS 20.

The results of this study indicate that the regional financial accounting system influences the performance of local government and good governance influences the performance of local government.

**Keyword : *Regional Financial Accounting System, Good Governance
and Local Government Performance***

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah dan mengatur kewenangan otonomi daerah. Sedangkan menurut UU No.32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang menjalankan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penilaian kinerja kegiatan yang sangat penting digunakan untuk mengukur suatu organisasi sebagai acuan untuk mencapai visi yang ditetapkan (Agus Dwiyanto 2006:47).

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran yang menampilkan tingkat pencapaian suatu tujuan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sebagai perencanaan (Mohamad Mahsun 2013:25). Kinerja hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan di pemerintah daerah (Ira Halidayati 2014).

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan Kinerja dari organisasi atau Instansi Pemerintah Daerah (Muhamad Fadel 2008;14). Kinerja Pemerintah Daerah sebagai catatan dari hasil yang di capai pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya dalam waktu tertentu (Ratu Wardarita, 2017:9). Gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang termuat dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mohammad Mahsun 2013:25). Rendahnya jumlah dan kualitas kinerja pemerintah daerah yang kurang baik dalam menjalankan kinerjanya yang dapat menyebabkan peneruraan kinerja di masa sekarang dan masa yang akan datang (Ira Halidayati 2014).

Adapun fenomena Kinerja Pemerintah Daerah yang terjadi di Kota Bandung yaitu Fenomena khusus dari kinerja pemerintah daerah yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kota Bandung Tahun anggaran 2017 dan semester I tahun anggaran 2018. Hasilnya, Kota Bandung memiliki piutang PBB senilai Rp 800 miliar. Evaluasi dari BPK Jawa Barat ini menjadi bahan Pemkot Bandung mengejar piutang tersebut. Pemkot akan berupaya menindak lanjuti piutang PBB tersebut. Meski nilai piutang ini masih cukup besar pihaknya akan tetap melakukan penagihan kepada para wajib pajak. Tidak ada kebijakan pemutihan pada wajib pajak yang menunggak PBB. Bahwa pemeriksaan PBB ini nantinya akan menjadi patokan dalam menilai pengelolaan kinerja keuangan Pemkot Bandung. Sebab PBB juga menjadi bagian dari laporan keuangan yang harus disampaikan Pemkot Bandung. Kami menyepakati yang nantinya akan menjadi patokan kami ketika menilai pengelolaan kinerja dan membuat simpulan pengelolannya dan rekomendasi perbaikan. (Arman Syifa, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

Proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan dan suatu pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Erlina, Omar Sakti rambe, Rasdianto 2013:6). Proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (Abdul Halim 2007:42).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai informasi keuangan daerah, pengawasan atau pengecekan, biaya terikat Mulyadi (2010:19). Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan daerah pertanggungjawab, manajerial, pengawasan (Abdul Halim 2004:28).

Adapun fenomena mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada 2011 dan 2012, pemkab juga mendapat hasil serupa. Bahkan pada tahun 2013 sempat memperoleh opini Tidak Memberikan pendapat (TMP). Permasalahan dalam laporan Pemkab Bandung adalah lemahnya sistem akuntansi keuangan daerah yang berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau transaksi yang tidak dicatat, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja modal, penyajian dan pengelolaan saldo persediaan yang tidak memadai. Selain itu, penyajian aset tetap yang tidak didukung oleh daftar rincian aset maupun dokumen yang mendukungnya. Seperti penyajian jumlah dan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada dinas sumber daya air, pertambangan dan energi sebanyak 937 unit dengan nilai aset sebesar Rp 143, 27 miliar yang belum dapat diyakini kebenarannya. Sehingga kelemahan dari pemerintah kabupaten Bandung adalah pengelolaan aset yang banyak tidak tercatat dan kesalahan dalam penilaian maupun pengklasifikasiannya. Lemahnya dalam sistem akuntansi keuangan daerah yang berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau transaksi yang tidak dicatat dan termasuk dalam indikator pencatatan. (Maman Sunjaya, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, 2016).

Pelayanan publik harus sigap terhadap kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaannya dengan menerapkan prosedur *Good Governance*, meningkatkan tanggapan terhadap pelayanan publik ini menjadi ukuran baik tidaknya kinerja instansi dan pelayanan yang bersangkutan (Abidarin Rosidi 2013:21). *Good Governance*,

sebagian besar pihak yang berkepentingan di pemerintahan pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (Abidarin Rosidi 2013:21). Hubungan yang secara bertahap dan membangun di anatara negara, swasta, dan Social (Agus Dwiyanto 2005:82).

Adapun fenomena *Good Governance* yaitu, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan telah melanggar prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan bertanggung jawab, sehingga kerugian negara yang timbul akibat aksi korporasi. Dalam surat dakwaan, Karen telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya, telah menyetujui PI tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA). Perbuatan Karen telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia, dan sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno Karen telah membuat kerugian negara sebesar Rp 568 miliar. Mantan Direktur PT. Pertamina melanggar prinsip *good governance* sehingga dijatuhi hukuman dan termasuk dalam indikator Supremasi Hukum. (T Pakpahan, Jaksa, 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

1.3.2 Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis informasi dan data yang relevan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance*, Kinerja Pemerintah Daerah serta untuk memperoleh gambaran perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

1.3.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memecahkan masalah terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance*, dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang terdapat pada fenomena yang diangkat dalam penelitian ini baik bersifat umum maupun khusus, memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung dan memberikan solusi terkait dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang buruk , *Good Governance* yang buruk dan Kinerja Pemerintah Daerah yang buruk.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori telah ada diuji dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* berpengaruh terhadap dan Kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi yang khususnya mengkaji Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* berpengaruh terhadap dan Kinerja Pemerintah Daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai konsep penelitian, dan generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan teori

berupa premis untuk data konfirmasi penelitian yang mengkaji Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance* dan Kinerja Pemerintah Daerah.

2.1.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:43) adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah 10 (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Deddi Nordiawan (2010:201), yaitu:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

2.1.2. *Good Governance*

Good Governace adalah sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi. Hendra Karianga (2017:40)

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Donni Juni Priansa (2018:97) yaitu:

1. Partisipasi
2. Supremasi Hukum
3. Tranparansi
4. Responsif
5. Konsesus
6. Keadilan
7. Efisien dan efektif
8. Tanggungjawab

2.1.3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Muhammad Fadel (2008:14) yang dimaksud dengan kinerja pemerintah

daerah merupakan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintah daerah.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Indra Bastian (2005:267) yaitu:

1. Masukan (*Input*)
2. Keluaran (*Output*)
3. Hasil (*Outcome*)
4. Manfaat (*Benefits*)
5. Dampak (*Impacts*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009:84) menyatakan Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut .

Teori-teori tersebut didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti menurut Vivid Annisa (2017), Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Yuliana Dwi Jayanti (2015), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Novita Lerly Djiloy (2016), Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

2.2.2 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Donni Juni Priasa (2018:92), Penerapan konsep *good governance* dalam pemerintah daerah akan memberikan manfaat berupa melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan.

Teori-teori tersebut di dukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti menurut Vivid Annisa (2017), *Good Governance*

berpengaruh dengan kinerja pemerintah daerah. Menurut Yuliana Dwi Jayanti (2015), *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Chici Claraini (2017), *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti perlu berasumsi mengambil keputusan sementara (Hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

H₂ : *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Umi Narimawati (2010:29), metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode penelitian verifikatif. menurut Metode deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) adalah Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”

Sedangkan metode verifikatif menurut Metode verifikatif menurut Umi Narimawati (2010:29) adalah Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SEM-PLS 3.0 dengan metode pendekatan kuantitatif.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), *Good Governance* (X_2) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Unit analisis pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung dengan unit observasi yang dituju adalah Kepala Dinas, Bagian Keuangan dan Staf.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) Operasionalisasi variabel adalah proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator, sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi variabel dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Berdasarkan judul yang peneliti ambil pada penelitian ini yaitu mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 variabel yaitu:

1. Variabel bebas atau *Independent Variable* (Variabel X_1 dan X_2)

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan *Good Governance* (X_2).

2. Variabel terikat atau *Dependent Variable* (Variabel Y)

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137), Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi, Melakukan pengamatan secara langsung pada OPD Kota Bandung untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Kuesioner, Menurut Umi Narimawati (2010:40), kuesioner adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti

3.4 Metode Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini sebanyak 60 responden yang terdiri dari Kepala dinas, Bagian keuangan dan staf pada 20 OPD di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2017:85) pengertian dari *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi di objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas adalah ketepatan atau alat ukur yang digunakan dengan kuesioner yang dirancang oleh peneliti dapat benar-benar diukur.

3.5.2 Uji Realibilitas

Menurut Sugiono (2012:177) uji reabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:174), analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Adapun alat uji untuk analisis data deskriptif yaitu menggunakan SPSS 20.0

3.6.2 Analisis Data verifikatif

Menurut Noor Juliansyah (2012:20) analisis verifikatif adalah penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan yang telah ada. Analisis verifikatif verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan statistik yaitu dengan Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model*) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS 3.0.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Kuesioner yang disebarkan ke 60 responden pada 20 OPD di Kota Bandung dengan jumlah kuesioner tiap dinas sebanyak 3 Kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 57 kuesioner dan sisanya sebanyak 3 kuesioner tidak kembali dikarenakan kuesioner yang hilang di tempat kerja responden

4.1.2 Pengukuran Kualitas Alat Ukur Penelitian

Sebelum melakukan analisis, data harus diuji terlebih dahulu baik secara validitas maupun reliabilitas dengan maksud untuk menguji apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan (*reliability*) berupa butir *item* pernyataan yang telah diajukan kepada responden.

1. Uji Validitas

Uji validitas bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kuesioner itu valid atau tidak valid. Dikatakan valid apabila pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan hal yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. Suatu alat ukur dikatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas $> 0,30$. dengan menggunakan SPSS 20.0. Nilai koefisien validitas variabel sistem akuntansi keuangan daerah, *good governance* dan kinerja pemerintah daerah menunjukkan nilai yang lebih besar dari titik kritis yaitu 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini bertujuan untuk menguji suatu alat ukur penelitian. Dalam pengujian ini menggunakan teknik belah dua (*split half method*) yang mana dikatakan reliabel apabila melebihi titik kritis 0,7. Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 20.0. Hasil pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *spearman brown* pada masing-masing variabel sistem akuntansi keuangan daerah, *good governance* dan kinerja pemerintah daerah menunjukan angka lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban yang telah diberikan oleh responden terkait dengan pernyataan dapat dipercaya.

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tanggapan pernyataan yang diberikan kepada tiap responden mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance* dan Kinerja Pemerintah Daerah. Tanggapan yang diberikan oleh responden akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil tanggapan responden.

1. Tanggapan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil analisis deskriptif mengenai sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan kriteria baik (68,88%).

2. Tanggapan Responden Mengenai *Good Governance*

Hasil analisis deskriptif mengenai *good governance* menunjukkan kriteria baik (70,57%).

3. Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil analisis deskriptif mengenai kinerja pemerintah daerah menunjukkan kriteria cukup baik (69,19%).

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis yang diajukan yaitu adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Terdapat 2 jenis model yang terbentuk dalam *Structural Equation Modelling*, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Hasil pengujian validitas dengan melihat *Convergency Validity*. Syarat untuk menilai *convergency validity* yaitu harus bernilai lebih dari 0,5-0,6 termasuk kategori cukup, dan nilai $> 0,7$ termasuk kategori tinggi. sedangkan nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus $\geq 0,5$. sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki validitas yang baik. Selain itu apabila melihat dari nilai *discriminant validity* baik itu dari *cross loading factor* maupun perbandingan akar AVE dengan variabel laten keduanya memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi antara variabel dengan indikatornya daripada pengukuran dengan yang lainnya.

b. Hasil pengujian reliabilitas dengan melihat nilai *composite reliability*

bahwa syarat reliabel adalah $>0,7$ dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *composite reliability* baik itu variabel sistem akuntansi keuangan daerah, *good governance* maupun kinerja pemerintah daerah semuanya berada diatas $0,7$ berarti data tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.

- c. Standar dari nilai GoF adalah $\geq 0,36$ termasuk kriteria besar, dan hasil pengujian menunjukkan angka $0,614$ yang berarti nilai GoF sudah terpenuhi.

2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*).

- a. Sistem Akuntansi keuangan Daerah memberikan pengaruh lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah, begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis.
- b. *Good Governance* memberikan pengaruh lebih kecil terhadap kinerja pemerintah daerah, begitu pula dengan hasil pengujian hipotesis.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar $5,461$ lebih besar dari t_{tabel} ($1,96$) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yaitu sebesar $35,99\%$ yang artinya bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator pencatatan dengan persentase $67,37\%$ dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap*

sebesar $32,63\%$. Dikarenakan jawaban responden sebanyak 27 responden menjawab sangat keliru dan sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh sebesar $35,99\%$ terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar $0,761$ yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung. Arah hubungan positif sistem akuntansi keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar $35,99\%$ terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya $64,01\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar $68,88\%$ dan termasuk kategori baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator pelaporan sebesar $69,23\%$. Terdapat *gap* sebesar $30,77\%$ yang merupakan masalah yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya kinerja pemerintah daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar $69,19\%$ dan masuk dalam kategori baik yang artinya kinerja pemerintah daerah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondenya adalah indikator *Impact* sebesar $69,49\%$, namun masih terdapat *gap* sebesar $40,51\%$.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung

Hasil penelitian ini didukung teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:84) yang menyatakan Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang

mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut .

4.2.2 Pengaruh *Good Governance* Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,061 lebih besar dari t_{tabel} (1,96) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu sebesar 29.08% yang artinya bahwa *good governance* terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kantor Pemerintahan Kota Bandung

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator supremasi hukum dengan persentase 67,37% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup baik, namun terdapat *gap* sebesar 32,63% . Dikarenakan jawaban responden sebanyak 27 responden menjawab jarang dituntaskan dan dituntaskan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, *good governance* berpengaruh sebesar 39,08% terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,740 yang berarti *good governance* memberikan pengaruh yang tinggi arah positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kantor Pemerintahan Kota Bandung. Arah hubungan positif *good governance* dengan kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa *good governance* yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa *good governance* memberikan pengaruh sebesar 29.08% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 70,92% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa *good governance* mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 70.57% dan termasuk kategori baik yang artinya *good governance* baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator responsif sebesar 71.93%. Terdapat *gap* sebesar 28.07% yang merupakan masalah yang ada pada *good governance*. Selanjutnya kinerja pemerintah daerah mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 69.19% dan masuk dalam kategori baik yang artinya kinerja pemerintah daerah baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling tinggi tanggapan respondennya adalah indikator *Impact* sebesar 69.49%, namun masih terdapat *gap* sebesar 40.51%.

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana *good governance* yang semakin baik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung.

Hasil penelitian ini didukung oleh Donni Juni Priasa (2018:92), Penerapan konsep *good governance* dalam pemerintah daerah akan memberikan manfaat berupa melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja pemerintah daerah akan mengalami peningkatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuesioner dalam pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus pada OPD Kota Bandung), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung), dimana semakin tinggi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan dalam

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam pencatatan.

2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung), dimana semakin tinggi *Good Governance* akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan dalam *Good Governance* yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ataupun peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari beberapa point tanggapan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani sistem akuntansi keuangan daerah, seperti menerapkan prinsip-prinsip sistem akuntansi keuangan daerah dan juga diadakannya pelatihan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang benar sesuai prinsip-prinsip sistem akuntansi keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam pencatatan.
2. *Good Governance* yang baik dapat dinilai dari beberapa point tanggapan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani *Good Governance*, dengan merapan prinsip-prinsip *good governance* membantu pemerintah dalam mengatasi supremasi hukum yang merugikan dan juga di adakan rapat tertutup setiap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abba Gabrillin. 2019. Menurut jaksa, karen agustiawan melanggar prinsip good governance, <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/10510941/menurut-jaksa-karen-agustiawan-melanggar-prinsip-good-governance>.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abidarin Rosidi. 2013. *Reinventing Government*. Jakarta :Alfabeta
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bayu Anggoro. 2017. *Buruk, Kinerja OPD Kota Bandung*. Melalui: <https://mediaindonesia.com/read/detail/106795-buruk-kinerja-tiga-opd-kota-bandung>
- Chici Clarini, 2017. *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. JOM Fekon, Vol.4 No.1 (April) 2017.
- Dedi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Donni Juni Priansa. 2018. *Manajemen Organisasi Publik Mengembangkan Organisasi Modern Berorientasi Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*

- Berbasis Akrua*. Jakarta: SalembaEmpat
- Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok :Kencana
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ira Halidayati, 2014. *Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mohamad Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Muhammad Fadel. 2008. *Reinventing Local Government: Pengalamandari Daerah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Noor Juliansyah. 2012. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grou
- Novita Lerly Djiloy. 2016. *Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi*. Sigi: Universitas Sigi. ISSN: 2302-2019.
- Ratu Wardarita. 2017. *Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai*. Yogyakarta : Elmatara
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: GENESIS.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vivid Annisa. 2017. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Yuliana Dwi Jayanti. 2015. *Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Zuli Istiqomah. 2018 Kota Bandung Kejar Piutang PBB Rp 800 Miliar. <https://nasional.republika.co.id/berita/phxkkg370/kota-bandung-kejar-piutang-pbb-rp-800-miliar>